

## ***Potensi dan Masalah Penduduk***

Sering ditemukan dalam berbagai seminar, diskusi, workshop ataupun rapat. Mempermasalahkan keabsahan dari sebuah data. Padahal setiap fakta yang ditabulasikan menjadi sebuah data selalu berubah setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Terus dinamis baik berkurang ataupun bertambah. Disadari ataupun tidak bahwa data itu hanya sebuah media untuk mulai berpikir dan bergerak kearah yang lebih baik dari kondisi semua. Mengarah pada situasi yang diinginkan.

Data memang diperlukan untuk landasan berpikir melakukan langkah menemukan solusi dalam memecahkan masalah hidup dan kehidupan. Tentunya dari fakta yang sudah ditabulasikan menjadi data yang bisa diukur, dianalisis, diurai serta dipersepsikan berdasarkan pengetahuan dan kemampuan analisis. Baik ditambah, dikurang, dikali ataupun dibagi. Dibandingkan, disandingkan atau dielaborasi. Namun bagi bangsa Indonesia sering menemukan persoalan dalam hal melakukan rumus pembagi. Sehingga dalam setiap pembagian apapun selalu menyisakan persoalan baru.

Sebagai ilustrasi tentang data penduduk Kota Sukabumi hasil sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 299.247 jiwa yang ditayangkan pada seminar SDKI (7 Maret 2011) oleh Kepala BPS Jawa Barat (Lukman) berjumlah 298.681 jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil pendataan Kepala Keluarga oleh BPMPKB Kota Sukabumi berjumlah 288.224 jiwa. Mengapa pendataan keluarga perlu dilakukan oleh BPMPKB. Hal itu untuk mengintervensi program yang disepakati pimpinan dunia tentang MDGs. Apakah yang berhubungan dengan penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, perlawanan terhadap penyakit, pelestarian lingkungan hidup ataupun kerjasama global.

Dari hasil pendataan keluarga 28 Desember 2010 telah ditetapkan dengan surat Walikota Sukabumi nomor 800/189/um bahwa dari jumlah penduduk 288.224 terdapat 75.551 Kepala Keluarga yang di dalam-nya terdapat Keluarga miskin 14.703 Kepala Keluarga. Jadi mau dibagaimanakan orang miskin itu ? tentunya bagi BPMPKB dijadikan landasan untuk membuat program peningkatan revitalisasi aktivitas UPPKS dan UP2K. dengan harapan jumlah Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera sebanyak 196 di tahun 2010 akan dikembangkan menjadi 210 di tahun 2011. Walaupun kegiatan UPPKS tidak signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan. Paling tidak memberikan support dan kontribusi konkrit terhadap pengembangan ekonomi mikro dan sector informal. Tetapi riil dirasakan oleh para akseptor KB dan atau oleh mantan akseptor KB yang sudah memasuki menepous.

Sedangkan Usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) yang tadinya merupakan model pengembangan Badan Pembangunan Masyarakat Desa (BPMD) yang dikerjasamakan

dengan PKK. Diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Relevan dengan penguatan lembaga ekonomi desa ( BUMDES ). Yang terjadi pada dekade tahun 2011 ternyata lebih mengedepankan pertentangan masalah keberadaan data Miskin. Bukan berupaya keras menangani orang miskin. Memang tidak ada instansi yang berani menyampaikan data miskin. Yang ada, adalah garis kemiskinan, tahapan KS. Kendatipun ada hanya merupakan analogi. Misalnya dari BPMPKB untuk menyampaikan data miskin dianalogikan dari data Pra KS alasan ekonomi dengan KS1 alasan ekonomi. Dari BPS garis kemiskinan. Dari Dinas Sosial mengenai Penyandang Masalah Sosial (PMKS). Dari Bazis dengan istilah Mustahik. Namun kata mustahik ternyata ada delapan asnap. (fakir, miskin, mualaf, gorimin, ibnu sabil, hamba sahaya dan fisabilillah serta amilin). Jadi berapa sebenarnya orang miskin yang disepakati bersama? Dan berapa masing-masing pihak mampu untuk menangani orang miskin bisa bergeser jadi orang yang mampu. Dengan harapan bisa menggeser dari Mustahiq menjadi Muzaqi.

Data orang miskin yang olah BPMPKB dari Pra KS alasan ekonomi dan KS1 alasan ekonomi. Yaitu pada tahun 2006 berjumlah 21.120 dari 65.691 KK berarti 32,15%. Tahun 2007 sebanyak 19.944 dari 69.614 KK berarti 28,64% tahun 2008 16.433 dari 72.319 KK berarti 22,72%, tahun 2009 16.335 dari 73.977 KK berarti 22,08% pada tahun 2010 14.704 dari 75.551 KK berarti 19,46%.. jika di dalam Musrenbang tingkat Kota Sukabumi untuk tahun 2012 angka kemiskinan ditargetkan 10% perhitungannya seperti apa dan dari mana asumsinya. Boleh saja semua orang menggebu-gebu untuk menurunkan angka kemiskinan. Dengan catatan intervensinya jelas, dasar perhitungannya jelas, angka dasarnya jelas, kondisi ekonomi, sosial dan budaya konstan atau lebih maju. Namun bila asumsi tidak diintervensi maka target menurunkan angka kemiskinan hanya merupakan isapan jempol. Apalagi angka penurunannya spektakuler.

Potensi penduduk Indonesia cukup menggembirakan untuk bisa bangkit dari berbagai krisis. Namun bila intervensi program *family panning* (KB) tidak sungguh-sungguh jangan harap potensi itu bisa merubah keadaan. Dari Negara miskin jadi Negara berkembang, dari Negara berkembang menjadi Negara maju. Dikarenakan perkembangan kesejahteraan harus diimbangi pula dengan rasio angka ketergantungan. Apalagi bila di dalam satu keluarga hanya ada satu orang yang bisa menafkahi keluarganya. Belum lagi banyak Keluarga yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan. Bahkan bila orang kaya hanya bermain divalas dan saham (pasar modal). Tanpa diimbangi dengan investasi di sector riil. Maka akan terjadi ekonomi penggelembungan. Inflasi yang tidak terkendali. Sehingga produksi lemah. Ketika produksi lemah maka kebutuhan barang melonjak, barang akan langka. Begitu barang langka terjadi gejolak sosial. Gejolak sosial tak terkendali akan terjadi instabilitas. Disanalah muncul kejahatan. Yang menggiring pada keterpurukan dan kemiskinan.

Kompleksitas permasalahan kemiskinan berawal dari ketidak berdayaan. Jadi untuk membuat orang iut berdaya. Tentunya harus diberi kemampuan dan keterampilan yang dimotivasi oleh kemauan serta kerja keras. Bila semuanya biasa-baiasa saja dan landai-landai saja maka kebutuhan akan semakin jauh meninggalkan kemampuan yang dimiliki. Ketika kemampuan dengan kebuthan semakin curam maka kompleksitas kemiskinan akan semakin sulit diurai. Jadi potensi penduduk itu harus dioptimalkan supaya tidak bergeser menjadi masalah. Walaupun maslah di dunia ini tidak akan pernah ada habis-habisnya. Minimal ketika dihadapkan oleh suatu maslah mampu menemukan solusinya.